

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman digital seperti sekarang, informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Akses terhadap informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami semakin meningkat, terutama dalam memahami kebijakan yang berlaku. Media sosial pun telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dari total 278,7 juta penduduk, sekitar 185,3 juta di antaranya telah menggunakan internet. Data dari *We Are Social* (2023) menunjukkan bahwa 68,9% penduduk Indonesia aktif menggunakan internet, dengan konten audio-visual menjadi pilihan utama dalam mengonsumsi informasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik. Pemerintah Indonesia merespons perubahan ini dengan mengembangkan konsep *e-Government* atau pemerintahan berbasis elektronik. *e-Government* adalah pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas layanan kepada masyarakat.

Pemerintah telah memperkenalkan konsep pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. *E-Government* dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, pelayanan publik (Ashaye & Irani, 2019), pengelolaan data dan informasi serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, *e-Government* juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintah dan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Sari et al., 2022). Dalam konteks ini, akses terhadap informasi publik menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan.

Salah satu implementasi nyata *e-Government* di Indonesia adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). JDIH adalah sistem nasional berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan akses terbuka terhadap dokumen hukum seperti peraturan daerah, keputusan, perundang-undangan, dan produk hukum lainnya secara cepat, akurat, dan terstruktur. Pengembangan JDIH ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), yang menyatakan bahwa JDIH merupakan wadah kerja sama secara terpadu dan terkoordinasi dalam pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum secara bersama, berkesinambungan, dan berkelanjutan (Pasal 1). Tujuan utamanya adalah untuk menjamin pengelolaan dokumentasi hukum yang akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh publik.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menegaskan pentingnya keterbukaan dokumentasi hukum. Pada Pasal 44, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memelihara sistem dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi hukum secara digital bukan sekadar inovasi, tetapi merupakan amanat regulasi yang harus diwujudkan oleh setiap institusi pemerintahan, termasuk di tingkat daerah.

Di Kota Semarang, JDIH dikelola oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang. Lembaga ini berperan sebagai unsur pendukung yang bertugas memberikan pelayanan administratif, keuangan, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan fungsi legislatif DPRD. Salah satu tugas utama dari Sekretariat DPRD adalah mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang merupakan bagian dari program nasional untuk menyediakan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh publik. Kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang berlokasi di Jl. Pemuda No. 148, Semarang, Jawa Tengah, dan menjadi pusat pengelolaan dokumen serta layanan informasi publik berbasis hukum. JDIH DPRD Kota Semarang dapat

diakses oleh masyarakat umum untuk menelusuri berbagai produk hukum yang telah ditetapkan. Informasi yang tersedia mencakup peraturan daerah (Perda), keputusan DPRD, agenda legislasi, dokumen publik, dan berita kelembagaan, semua dikemas dalam format yang mudah diakses dan dicari.



Gambar 1. 1 Website JDIH DPRD Kota Semarang

Sejak diluncurkan pada tahun 2023, JDIH DPRD Kota Semarang telah mendapat pengakuan nasional sebagai salah satu pengelola JDIH terbaik, dengan meraih peringkat ke-2 secara nasional pada tahun yang sama, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nuraini Sofia, SE., MM., selaku Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD Kota Semarang. Penghargaan ini menunjukkan bahwa dari sisi pengelolaan, JDIH telah memenuhi standar nasional.

Capaian prestasi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan JDIH. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Ibu Nuraini Sofia SE, MM selaku Kepala Bagian Humas divisi peliputan Sekretariat DPRD Kota Semarang pada wawancara pada tanggal 6 Maret 2025 di kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang.

“JDIH adalah program nasional dan JDIH adalah program unggulan dari DPRD Kota Semarang. Kebetulan JDIH DPRD Kota Semarang peringkat 2 di tahun 2023 dengan penyerahan hadiah pada 2024” ujar Ibu Nuraini Sofia SE, MM selaku Kepala Bagian Humas divisi peliputan Sekretariat DPRD Kota Semarang (Sekretariat DPRD Kota Semarang, 6 Maret 2025).

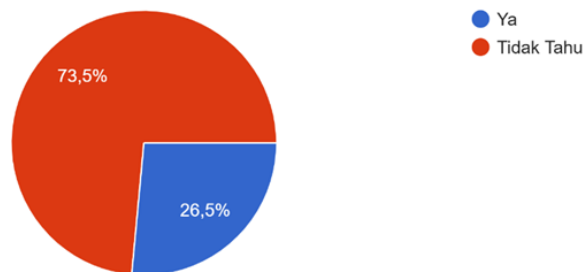
Meskipun website JDIH telah tersedia dan memenuhi standar dokumentasi hukum nasional, tingkat pemanfaatan masyarakat terhadap platform ini masih tergolong rendah. Sejak dirancang di tahun 2022 dan diluncurkan pada tahun 2023, JDIH menghadapi berbagai tantangan dalam proses sosialisasi khususnya di Kota Semarang. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan JDIH. Meskipun memiliki potensi besar meningkatkan layanan DPRD Kota Semarang, per Maret 2025 masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau memahami sepenuhnya manfaat yang ditawarkan website JDIH. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan informasi hukum yang sudah tersedia dan kesadaran masyarakat dalam mengakses serta memahami konten tersebut.

Dalam konteks ini, media sosial seperti Instagram dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif untuk memperkenalkan JDIH kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda yang lebih aktif di ruang digital. Produksi video edukasi singkat yang dipublikasikan melalui Instagram Reels menjadi strategi yang potensial untuk meningkatkan jangkauan informasi sekaligus literasi hukum masyarakat. Agar strategi ini benar-benar tepat sasaran, diperlukan dasar yang kuat dalam merancang konten dan pendekatan komunikasi yang digunakan. Oleh karena itu, dilakukan observasi dan survei sebagai bagian dari proses awal perancangan.

Berdasarkan observasi awal dan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2025 sampai 15 Maret 2025 dengan total responden 102 masyarakat dengan *random sampling* dan target *audiens* pelajar/mahasiswa, pekerja serta masyarakat yang tersebar di Kota Semarang, ditemukan bahwa kesadaran dan pemanfaatan JDIH di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, masih tergolong rendah. Mayoritas responden yang berusia 17–25 tahun tidak mengetahui keberadaan JDIH DPRD Kota Semarang, apalagi memahami fungsinya sebagai sumber informasi hukum yang resmi, lengkap, dan mudah diakses.

9. Apakah Anda tahu tentang JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Sekretariat DPRD Kota Semarang?

102 jawaban



Gambar 1. 2 Data Survey Tentang Pengetahuan Layanan JDIH

Hasil survey menunjukkan bahwa kebijakan ini belum tersebar secara luas di kalangan masyarakat, seperti pada gambar 1.2 menunjukkan 73,5% dari total responden mengindikasikan bahwa mereka belum mengetahui layanan JDIH, sementara 26,5% menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui. Menurut hasil wawancara dengan pihak JDIH, kurangnya edukasi dan sosialisasi yang efektif menjadi salah satu faktor utama rendahnya tingkat pemahaman masyarakat khususnya di Kota Semarang mengenai JDIH.

Sekretariat DPRD Kota Semarang juga mengakui bahwa kampanye mereka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang JDIH belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan dan belum berjalan efektif, serta belum adanya kampanye digital dalam memberikan informasi kepada masyarakat Kota Semarang seperti pengguna sosial media. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan dalam penyusunan strategi pembuatan konten yang baik dan terstruktur pada media digital salah satunya. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Nuraini Sofia SE, MM selaku Kepala Bagian Humas divisi peliputan Sekretariat DPRD Kota Semarang, yang menyatakan:

“Masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami JDIH, padahal JDIH sendiri ada dimana-mana bahkan ditingkat OPD (kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota). Selama ini kami sudah mencoba melakukan sosialisasi JDIH, misalnya dengan mengadakan kegiatan

sosialisasi di Car Free Day (CFD), mengundang pelajar dan mahasiswa untuk berkunjung ke kantor DPRD, serta bekerja sama dengan beberapa kampus seperti UNNES, UDINUS, dan UPGRIS. Tapi memang masih banyak yang belum tahu tentang JDIH” ujar Ibu Nuraini Sofia SE, MM selaku Kepala Bagian Humas divisi peliputan Sekretariat DPRD Kota Semarang (Sekretariat DPRD Kota Semarang, 6 Maret 2025).

Lebih lanjut, Ibu Aini menyampaikan bahwa media sosial, terutama Instagram, merupakan kanal yang potensial untuk menyampaikan informasi hukum kepada generasi muda. Akan tetapi, ia juga mengakui bahwa konten yang tersedia saat ini masih terbatas, kurang interaktif, dan belum cukup edukatif.

”JDIH adalah program nasional yang perlu dikenalkan kepada masyarakat dan menggunakan akun sekretariat adalah program dari pemerintah Kota Semarang tentang keaktifan sosial media dan yang digunakan untuk penilaian adalah akun Sekretariat DPRD Kota Semarang. Namun masih perlu inovasi konten digital yang lebih aktif dan edukatif untuk memperkenalkan JDIH di akun Sekretariat DPRD Kota Semarang” ujar Ibu Nuraini Sofia SE, MM selaku Kepala Bagian Humas divisi peliputan Sekretariat DPRD Kota Semarang (Sekretariat DPRD Kota Semarang, 6 Maret 2025).



Gambar 1. 3 Akun Instagram Sekretariat DPRD Kota Semarang

Gambar 1.3 merupakan akun Instagram Sekretariat DPRD Kota Semarang dengan *username* @sekretariat.dprdkotasemarang yang sudah dibuat sejak Juli 2023. Salah satu media sosial milik DPRD Kota Semarang yang masih tergolong baru dibandingkan dengan media sosial lainnya. Pada 8 April 2025, akun Instagram @sekretariat.dprdkotasemarang memiliki total 906 *followers* dan terus akan bertambah.

Akun Instagram @sekretariat.dprdkotasemarang merupakan media resmi milik Sekretariat DPRD Kota Semarang yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi publik. Akun ini mempublikasikan berbagai konten yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan DPRD, seperti rapat, sidang paripurna, kunjungan kerja, hingga pengumuman dan layanan publik lainnya. Berdasarkan observasi terhadap akun tersebut, konten yang ditampilkan umumnya berupa dokumentasi foto kegiatan resmi, video singkat informatif, infografis, serta caption yang menjelaskan konteks kegiatan secara ringkas. Jenis konten ini cukup umum ditemukan pada akun pemerintahan yang bertujuan menyampaikan informasi secara formal dan informatif kepada masyarakat.

Tabel 1. 1 Analisis Performa 10 Postingan Terakhir

No	Tanggal	Jenis Konten	Like	Comment	Saved	Shared	Engagement Rate (ER)
1	11 April 2025	Kirab Haul Ke-125 KH.Sholeh Darat	55	0	0	2	6,29%
2	11 April 2025	Rapat Pansus LKPJ Walikota Semarang Tahun Anggaran 2024	27	1	0	1	3.20%
3	11 April 2025	Peliputan Penerimaan Kunjungan Kerja Tamu Komisi C DPRD Kabupaten Lampung Tengah	9	0	0	0	0,99%
4	11 April 2025	Peliputan Penerimaan Kunjungan Kerja Tamu Komisi C DPRD Kabupaten	10	0	0	0	1,10%

No	Tanggal	Jenis Konten	Like	Comment	Saved	Shared	Engagement Rate (ER)
		Lampung Tengah					
5	10 April 2025	Persiapan dan Peliputan Rapat Panitia Khusus	11	0	0	0	1,21%
6	10 April 2025	Giat Apel Pagi Sekretariat DPRD Kota Semarang	11	0	0	0	1,21%
7	10 April 2025	Giat Apel Pagi Sekretariat DPRD Kota Semarang	17	0	0	0	1,88%
8	8 April 2025	Peliputan dan Dokumentasi Kunjungan Kerja Kabupaten Musi Rawas	12	0	0	0	1,32%
9	8 April 2025	Peliputan dan Dokumentasi Kunjungan Kerja Kabupaten Musi Rawas	14	0	0	0	1,55%

No	Tanggal	Jenis Konten	Like	Comment	Saved	Shared	Engagement Rate (ER)
10	5 April 2025	Giat Apel Pertama di Pemerintahan Kota Semarang Setelah Libur Lebaran	17	0	0	3	2,21%

Berdasarkan analisis terhadap 10 unggahan terakhir akun Instagram @sekretariat.dprdkotasemarang per 11 April 2025, terlihat bahwa tingkat interaksi audiens terhadap konten yang diunggah masih tergolong rendah. Dari seluruh unggahan tersebut, hanya satu postingan yang berhasil meraih interaksi tertinggi, yaitu konten bertema “Kirab Haul Ke-125 KH. Sholeh Darat” yang memperoleh 55 “suka” dan 2 kali dibagikan. Sementara itu, konten lainnya seperti rapat pansus, apel pagi, dan dokumentasi kunjungan kerja umumnya hanya mendapat interaksi di bawah 20 “suka” tanpa komentar, simpanan, maupun pembagian ulang (*share*). Bahkan beberapa unggahan tidak memperoleh interaksi sama sekali dari segi komentar, simpan, atau bagikan.

Jenis konten yang paling sering diunggah adalah dokumentasi kegiatan formal, seperti rapat, apel, dan kunjungan kerja. Konten-konten ini bersifat informatif namun cenderung kurang menarik bagi audiens media sosial yang menginginkan tampilan visual dinamis dan pendekatan yang lebih interaktif. Minimnya variasi dalam format konten dan absennya konten edukatif atau video pendek berdampak pada rendahnya keterlibatan pengguna. Konten di akun @sekretariat.dprdkotasemarang banyak menggunakan cara di *collab* dengan akun instagram lain untuk menambah postingan kegiatan di akun sekretariat maupun di akun JDIH dan DPRD Kota Semarang, hal ini didapat melalui hasil wawancara dengan Ibu Aini yang menyatakan :

“karena ada program pemerintah Kota Semarang tentang keaktifan media sosial, akun Sekretariat DPRD Kota Semarang mengcollab postingannya ke akun lain supaya akun-akun tersebut aktif dan banyak kegiatan.” ujar Ibu Nuraini Sofia SE, MM selaku Kepala Bagian Humas divisi peliputan Sekretariat DPRD Kota Semarang (Sekretariat DPRD Kota Semarang, 6 Maret 2025).

Berdasarkan hasil observasi tersebut disimpulkan bahwa publikasi konten kurang dalam penyebaran informasi mengenai JDIH. Melalui hasil ini, dapat disimpulkan bahwa akun @sekretariat.dprdkotasemarang membutuhkan pendekatan baru dalam strategi kontennya. Konten yang lebih interaktif seperti video edukasi, carousel infografis, serta caption yang lebih komunikatif dengan ajakan untuk berinteraksi (*call to action*) berpotensi meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai JDIH. Terlebih lagi, pemanfaatan fitur Instagram Reels yang tengah populer akan lebih efektif menjangkau audiens yang lebih luas, sekaligus memperkenalkan program unggulan seperti JDIH secara lebih menarik dan mudah dipahami.

Dilihat dari perkembangan akun instagram milik Sekretariat DPRD Kota Semarang, penulis mencoba mengobservasi dan menganalisis data yang ada. Penulis mendapatkan beberapa kelemahan yang dimiliki oleh akun media sosial Instagram @sekretariat.dprdkotasemarang yakni interaksi dengan pengikut terlihat masih terbatas, dan belum banyak konten edukatif yang dikemas secara menarik untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap isu-isu penting seperti peraturan daerah atau layanan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Dari segi jumlah pengikut, akun ini memiliki tingkat jangkauan yang masih dapat ditingkatkan dengan optimalisasi konten yang lebih variatif dan interaktif. Untuk itu, produksi video edukasi tentang JDIH sangat relevan dilakukan, sebagai upaya mengedukasi masyarakat terkait dokumentasi hukum daerah dan meningkatkan transparansi serta literasi hukum. Video edukasi yang dikemas secara menarik, dengan durasi singkat namun informatif, serta visual dan audio yang berkualitas, berpotensi meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat dan efektivitas penyampaian

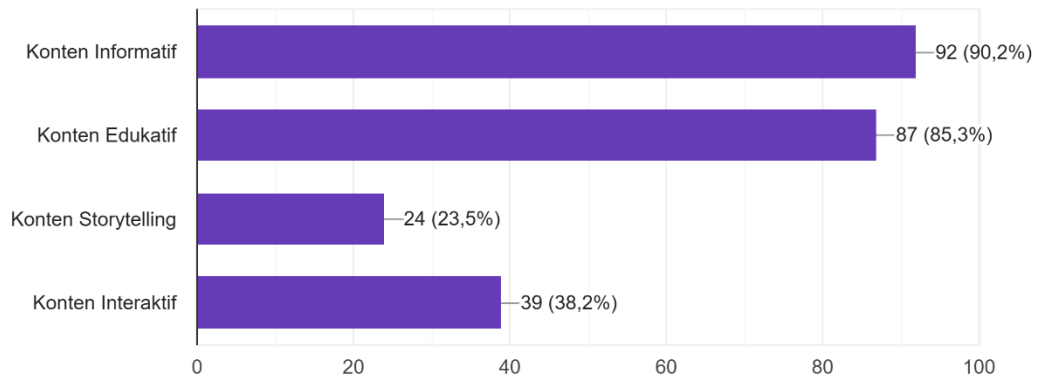
pesan melalui akun Instagram ini. Selain itu, pemanfaatan fitur seperti Instagram Stories, Reels, postingan mendorong peningkatan keterlibatan pengikut terhadap konten yang disampaikan.

Akun @sekretariat.dprdkotasemarang memiliki jangkauan audiens yang lebih luas dan representatif sebagai wajah resmi Sekretariat DPRD Kota Semarang. Akun ini secara aktif mempublikasikan berbagai kegiatan dan informasi kelembagaan yang sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga memiliki daya tarik dan tingkat interaksi yang lebih tinggi. Dengan memanfaatkan akun yang sudah memiliki basis pengikut, konten edukasi JDIH berpotensi lebih efektif dalam menjangkau masyarakat umum.

Sementara itu, akun @jdih.setwankotasmg lebih bersifat khusus dan cenderung diikuti oleh kalangan terbatas yang memang sudah memiliki minat atau kebutuhan terhadap informasi hukum. Dengan kata lain, audiens akun JDIH lebih spesifik dan tidak terlalu luas cakupannya. Maka dari itu, jika tujuan utama adalah mengedukasi masyarakat secara luas tentang pentingnya JDIH dan cara mengaksesnya, maka platform yang lebih umum seperti @sekretariat.dprdkotasemarang menjadi pilihan yang lebih strategis. Selain itu, melalui akun utama ini, konten edukatif JDIH juga bisa dikaitkan langsung dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD, sehingga menambah konteks yang relevan dan memperkuat nilai informasi yang disampaikan.

21. Jenis konten seperti apa yang menurut Anda efektif untuk memperkenalkan JDIH DPRD Kota Semarang?

102 jawaban

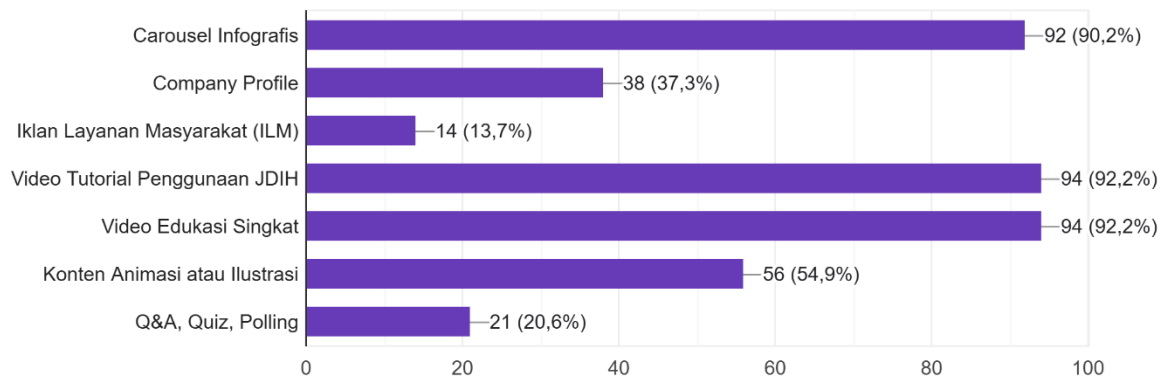


Gambar 1. 4 Data Survey Tentang Jenis Konten JDIH

Diperoleh data dari 102 responden mengenai jenis konten yang dianggap paling efektif untuk memperkenalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan bahwa konten informatif menjadi pilihan terbanyak dengan 90,2% (92 responden). Disusul oleh konten edukatif sebanyak 85,3% (87 responden), yang relevan dengan pendekatan video edukasi yang diusung dalam tugas akhir ini. Sementara itu, konten interaktif dipilih oleh 38,2% (39 responden), dan konten *storytelling* hanya memperoleh 23,5% (24 responden). Data ini mengindikasikan bahwa masyarakat lebih menginginkan konten yang bersifat langsung, padat informasi, dan sekaligus mendidik dalam memahami keberadaan dan fungsi JDIH. Temuan ini menjadi landasan penting dalam pemilihan bentuk dan gaya penyampaian video edukasi yang diproduksi, agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan pemahaman publik terhadap JDIH melalui media sosial Instagram.

23. Menurut Anda, konten tentang JDIH sebaiknya dikemas dalam bentuk seperti apa?

102 jawaban

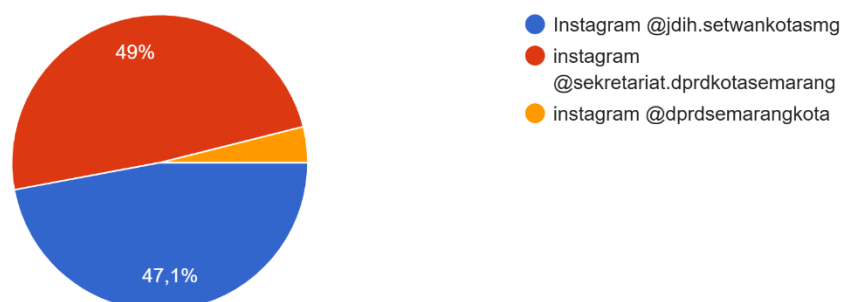


Gambar 1. 5 Data Survey Tentang Jenis Konten JDIH

Berdasarkan hasil survei, preferensi jenis konten yang paling menarik bagi responden dalam memperoleh informasi terkait JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang didominasi oleh video edukasi singkat dan video tutorial penggunaan JDIH dengan persentase sebesar 92,2%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih tertarik dengan konten yang bersifat visual dan ringkas. Disusul dengan carousel infografis dengan 90.2%

20. Dari akun instagram berikut, mana yang menurut Anda paling efektif digunakan untuk memperkenalkan JDIH DPRD Kota Semarang?

102 jawaban



Gambar 1. 6 Data Survey Tentang Akun Instagram

Dalam menyampaikan informasi ke masyarakat tanpa interaksi langsung, Humas DPRD Kota Semarang memanfaatkan berbagai akun media sosial Instagram seperti @dprdsemarangkota, @sekretariat.dprdkotasemarang, @jdih.setwankotasmg. Memahami perkembangan media sosial saat ini, JDIH memanfaatkan media sosial yakni Instagram dalam penyebaran informasi mengenai kegiatan, profil, jangkauan, dan program mengenai JDIH kepada masyarakat umum.

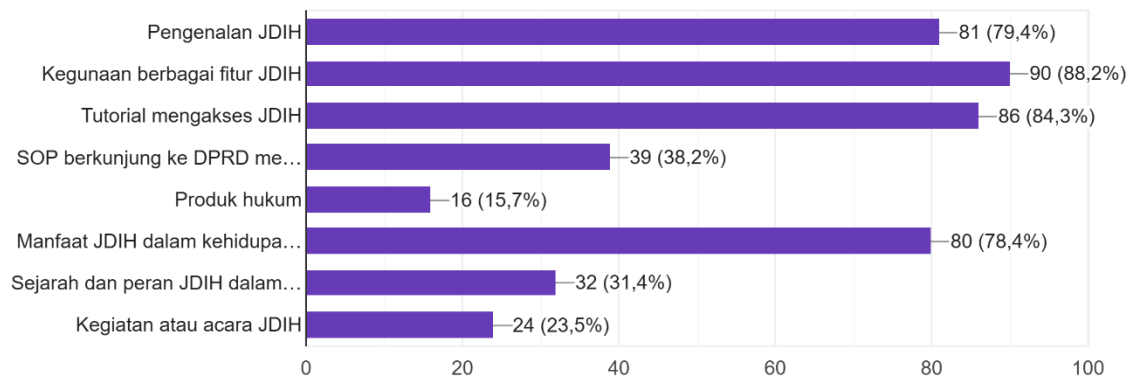
Pada gambar 1.6 menunjukkan bahwa 49% responden memilih platform Instagram Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai platform yang paling efektif untuk memperkenalkan JDIH. Pada April 2025, akun ini memiliki sebanyak 906 *followers* dan terus akan bertambah. Jumlah pengikut di platform Sekretariat DPRD Kota Semarang menunjukkan bahwa DPRD Kota Semarang berpotensi besar untuk menyebarkan informasi secara luas dan efektif jika adanya pelaksanaan kampanye kehumasan.

Selama ini belum ada upaya sosialisasi secara daring menggunakan media sosial. Hal ini bisa dilihat dari konten yang dibuat oleh Humas DPRD Kota Semarang yang telah dipublikasi pada media sosial, bahwa konten Humas DPRD Kota Semarang lebih fokus pada kegiatan-kegiatan DPRD seperti kunjungan dan sosialisasi.

Hal ini menyebabkan informasi terkait JDIH tidak tersebar secara merata dan tidak banyak masyarakat yang mendapatkan informasi lengkap mengenai manfaat dan cara menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan konten media sosial yang lebih strategis dan konsisten untuk memastikan pesan-pesan penting ini dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang.

24. Topik apa yang menarik bagi Anda untuk mengenal JDIH DPRD Kota Semarang?

102 jawaban



Gambar 1. 7 Data Survey Tentang Konten Media Sosial

Menurut data pada gambar 1.5 dari total 102 responden, bahwa 88,2% responden memilih topik konten kegunaan fitur JDIH. Sebanyak 84,3% memilih tutorial mengakses JDIH, hal ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam penyebaran informasi terkait JDIH. Survei ini mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang belum pernah mengetahui tentang fitur-fitur yang ditawarkan JDIH.

Ketidaktahuan ini menunjukkan adanya celah informasi yang signifikan yang harus diatasi untuk memastikan keberhasilan kampanye kehumasan terkait JDIH. Kurangnya paparan informasi ini berdampak pada rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan JDIH ini. Kondisi mempertegas perlunya perbaikan dalam melaksanakan strategi kampanye media sosial yang terarah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Saat ini pengguna smartphone di Indonesia yang paling banyak adalah di pulau Jawa sebesar 86,6% disusul oleh pulau Sumatera 84,14% serta pada peringkat ketiga pulau Kalimantan dengan jumlah 52,12%. Berdasarkan pengguna smartphone lebih banyak pada rentan usia 20-29 tahun dengan presentase 75,95% serta pada usia 30-49 sebesar 68,34% dan paling sedikit usia 50-79 dengan jumlah 50,79% (good stats, 2022).

Dengan keberadaan platform media sosial yang dominan di Indonesia seperti Instagram, Humas DPRD Kota Semarang memiliki peluang besar untuk melakukan kegiatan kampanye media sosial mengenai JDIH. Dengan adanya pengikut (*followers*) yang kuat pada akun Sekretariat DPRD Kota Semarang maka konten-konten kampanye dapat menyesuaikan dengan target audiens dari *followers engagement* media sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri et al. pada tahun 2024 menunjukkan bahwa penggunaan media visual, seperti presentasi multimedia, grafik, dan gambar, mampu meningkatkan perhatian audiens, memperjelas konsep yang kompleks, serta memotivasi keterlibatan aktif dalam diskusi. Temuan ini sejalan dengan teori pembelajaran multimedia yang dikembangkan oleh Mayer pada tahun 2020, yang menjelaskan bahwa penyampaian informasi melalui elemen visual yang menarik dapat meningkatkan pemahaman dan daya serap audiens secara lebih efektif dibandingkan dengan teks saja. Dengan demikian, pemanfaatan strategi komunikasi berbasis media digital yang sesuai dengan preferensi audiens menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemanfaatan JDIH oleh masyarakat.

Sekretariat DPRD Kota Semarang, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik, memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Melalui produksi konten digital yang menarik dan informatif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya akses informasi hukum yang mudah dan terpercaya melalui JDIH. Tugas akhir ini bertujuan untuk menghasilkan konten digital yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Kota Semarang terhadap JDIH, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang tersedia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan bahwa JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang berfungsi menyediakan, mengelola, dan menyebarluaskan produk hukum kepada masyarakat sebagai sarana peningkatan akses informasi dan kesadaran hukum yang diluncurkan oleh

DPRD Kota Semarang belum diketahui oleh masyarakat Kota Semarang dan tingkat pemanfaatan masyarakat terhadap layanan JDIH masih tergolong rendah yang terlihat dari data survei tentang pengetahuan JDIH. Oleh karena itu, diperlukan produksi video edukasi melalui akun media sosial Instagram @sekretariat.dprdkotasemarang sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kota Semarang mengenai JDIH sekaligus dapat meningkatkan *engagement rate* pada akun @sekretariat.dprdkotasemarang.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan program ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan serta fungsi JDIH khususnya di Kota Semarang melalui akun media sosial @sekretariat.dprdkotasemarang sebagai sumber informasi hukum yang dapat diakses secara terbuka dan menambah *engagement rate* pada akun media sosial Instagram @sekretariat.dprdkotasemarang.

1.4 Manfaat

Manfaat pembuatan konten sosial media mengenai pengenalan JDIH DPRD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi dan menambah wawasan dalam bidang komunikasi digital, khususnya dalam pemanfaatan konten media sosial sebagai media edukasi.
- b) Memberikan kontribusi dalam kajian akademik mengenai efektivitas media digital dalam menyampaikan edukasi informasi hukum kepada masyarakat.
- c) Menjadi referensi bagi penelitian atau proyek serupa yang berfokus pada optimalisasi media digital dalam penyebaran informasi hukum.

2. Manfaat Praktis

- a) Membantu Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam mengenalkan JDIH kepada masyarakat dengan cara yang lebih menarik dan efektif.

- b) Menyediakan referensi bagi instansi pemerintah lainnya dalam memanfaatkan akun instagram sebagai media sosialisasi kebijakan dan informasi hukum.
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akses informasi hukum yang mudah dan terpercaya melalui JDIH.

1.5 Luaran

Luaran dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah berupa konten digital di media sosial di Instagram yang akan memperkenalkan JDIH DPRD Kota Semarang. Konten ini mencakup 5 konten video pendek (*reels*) dengan durasi 10 menit yang akan dipublikasikan melalui akun Instagram @sekretariat.dprdkotasemarang.